



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# **BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN**

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018



## **EDISI 2**



# **BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN**

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN 2018

© 2019, Kementerian Keuangan

**Pembina:**

Suahasil Nazara

**Pengarah:**

Adriyanto, Ph.D.

**Tim Penyusun:**

Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) Tahun 2018

**Laporan dan Dokumentasi :**

Tim PKEM, BKF, Tim Biro KLI, Sekretariat Jenderal

**Editor:**

Riznaldi Akbar, Ph.D.

**Sekretariat :**

Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Tim Organisasi dan Tata Laksana-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tim Biro Komunikasi dan Layanan Informasi-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

**Desain Grafis:**

Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

**Penerbit:**

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-53083-5-2

# DAFTAR FORUM EKONOM

## KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

NAMA	UNIVERSITAS
Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec	Universitas Sumatera Utara
Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc	Universitas Andalas
Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc	Universitas Sriwijaya
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D	Universitas Padjadjaran
Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D	Universitas Diponegoro
Dr. Rudi Purwono	Universitas Airlangga
Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., Ph.D	Universitas Gajah Mada
Prof. Dr. Mansur Afifi	Universitas Mataram
Prof. Dr. Eddy Suratman	Universitas Tanjungpura
Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D	Universitas Lambung Mangkurat
Mohamad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D	Universitas Tadulako
Dr. Noldy Tuerah, S.E., MA	Universitas Sam Ratulangi
Prof. Marsuki, DEA	Universitas Hasanuddin
Dr. Rully N Wurarah	Universitas Papua
Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si	Universitas Pattimura





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>xv</b>
<b>PRAKATA FORUM EKONOM</b>	<b>xvii</b>
<b>ANALISIS ATAS BELANJA PERPAJAKAN</b>	<b>1</b>
Belanja Perpajakan	2
Dampak Ekonomi	6
<b>MENAKAR DAMPAK BELANJA PAJAK PEMERINTAH: SIMULASI INPUT-OUTPUT</b>	<b>11</b>
Pendahuluan	11
Permasalahan	12
Kajian Pustaka	12
Metodologi	14
Hasil Simulasi Dan Pembahasan	16
Dampak Terhadap Nilai Tambah	17



<i>Dampak Terhadap Upah dan Gaji</i>	18
<i>Dampak Terhadap Kesempatan Kerja</i>	19
<i>Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi pada Produk</i>	20
<i>Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi Pada Produksi</i>	21
<i>Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan</i>	22
<i>Referensi</i>	23
<i>Lampiran</i>	24
<b>PROBLEMATIKA DAN STRATEGI MENINGKATKAN TAX RATIO DI SULBAR</b>	<b>29</b>
Pendahuluan	29
Referensi: Pro-kontra Peningkatan Tax Ratio dan Strategi Meningkatkan Tax Ratio	30
Relatif Rendahnya Potensi Pendapatan Perpajakan di SulBar	33
Strategi Meningkatkan Tax Ratio di SulBar	38
Kesimpulan dan Saran	39
<b>"LANGKAH KLASIK" DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA</b>	<b>43</b>
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangannya	43
Kebijakan	44
Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	46
Penutup	49
Referensi	50
<b>DAMPAK TRADE WAR TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA</b>	<b>51</b>



Latar Belakang	51
Hubungan Perdagangan Indonesia, China dan Amerika Serikat	55
Dampak Perang Dagang Terhadap Perekonomian Indonesia	59
Rekomendasi	61
Referensi	62
<b>ANALISIS DANA DESA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEMISKINAN, KESENJANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b>	<b>65</b>
Pengantar	65
Kerangka Teori dan Penelitian Sebelumnya	66
Metodologi	68
Analisis Korelasi	68
Analisis Deskriptif	69
Hasil Penelitian dan Analisis	69
Dana Desa dan Kemiskinan	69
Dana Desa dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	71
Dana Desa dan Ketimpangan	72
Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi	74
Pemetaan Kinerja Propinsi Dan Kaitannya Dengan Distribusi Dana Desa	75
Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan	75
Distribusi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi	76
Kesimpulan dan Rekomendasi	78
Referensi	80





## **ANALISIS PENGGUNAAN EFEKTIVITAS DANA DESA DI DAERAH**

**83**

Rekomendasi

86

Referensi

91

## **PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI DESA MELALUI AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI**

**93**

Dana Desa dan Peruntukannya

94

Industrialisasi di Indonesia

98

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengembangan Agribisnis

dan Agroindustri

101

Referensi

105

## **INDUSTRIALISASI MELALUI DANA DESA**

**109**

Pendahuluan

109

Efektivitas Dana Desa

113

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Industri Desa

115

Referensi

122

## **KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH: STRATEGI DAERAH MENARIK INVESTASI**

**125**

Pengantar

125

Memacu Investasi untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah

127

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Investasi

128

Inovasi Daerah

129

Collaborative Governance

130

Strategi Menarik Investasi Masuk ke Daerah

131

Regulasi Investasi Daerah

131

X

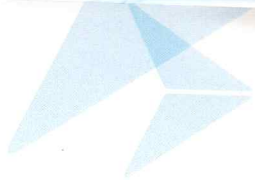
Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan  
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018



Stabilitas Keamanan Daerah	132
Stabilitas Regulasi Daerah	132
Konsistensi Kebijakan	132
Infrastruktur Daerah	133
Infrastruktur dukungan APBN Pemerintah Nasional	133
Pembentukan BUMD	134
Perencanaan Keuangan Daerah	134
Regulasi Daerah tentang Tenaga kerja	134
Insentif fiskal dan non-fiskal daerah	135
Lokasi Kawasan Industri	135
Entrepreneurial Government	135
Daya Saing Daerah	135
Penutup	136
Referensi	137
<b>KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH</b>	<b>139</b>
Pendahuluan	139
Membangun Daya Saing Daerah	141
Tata Kelola Pemerintahan	142
Konsekuensi Investasi Daerah	144
Implementasi Kebijakan Inovatif	145
Penutup	147
Referensi	149



<b>POTENSI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH</b>	<b>151</b>
Pendahuluan	151
Langkah-Langkah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	152
Mengoptimalkan Ekspor Hasil Pertanian	152
Mengurangi Impor Pangan	154
Upaya Menurunkan Konsumsi Beras Nasional	156
Regenerasi Petani	158
Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	160
Catatan Penutup	164
<b>PENGUATAN EKSPOR ANTAR WILAYAH</b>	<b>169</b>
Pendahuluan	169
Penguatan Ekspor Antar Wilayah	171
Rekomendasi Kebijakan	172
<b>MENGUKUR EFEKTIVITAS BELANJA MODAL DAERAH DALAM MENDORONG INVESTASI DI DAERAH</b>	<b>175</b>
Abstract	175
Pendahuluan	178
Pembahasan	182
Penutup	183
Referensi	



# ANALISIS DANA DESA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KE-MISKINAN, KESENJANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

**Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.**

*Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat*

## Pengantar

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkenalkan Dana Desa (DD) sebagai Dana Transfer dari Pemerintah ke Desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2015 dengan formula alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dana Desa mulai didistribusikan pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,7 Triliun. Jumlah tersebut terus meningkat hingga menjadi Rp 60 Triliun di tahun 2017 dan 2018 dan Rp 70 triliun di tahun 2019. Dana Desa diperkirakan akan meningkat terus sejalan dengan peningkatan pendapatan Negara dan jumlah Dana Transfer ke Daerah, namun alokasi jumlah Dana Desa ditetapkan tidak boleh melebihi sepuluh persen dari alokasi Dana Transfer ke Daerah di dalam APBN.

Dengan Dana Desa dan jumlah yang semakin membesar, diperkirakan akan mengubah distribusi dana antar daerah dan antar wilayah, mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Riset dan analisis keterkaitan Dana Desa dengan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat sedikit. Diperlukan



evaluasi terhadap distribusi Dana Desa yang sudah berjalan, paling tidak dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) mengingat jumlah yang semakin membesar. Studi ringkas ini bertujuan untuk **menganalisis keterkaitan Dana Desa dengan tingkat dan kedalaman kemiskinan di daerah, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan pengalokasian dan penggunaan Dana Desa.

### Kerangka Teori dan Penelitian Sebelumnya

Desentralisasi fiskal gelombang kedua<sup>1</sup>, barangkali merupakan terminologi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang mengharuskan Pemerintah untuk mengalokasikan dana di APBN sebesar 10% dana transfer ke daerah untuk Desa. Selain itu, Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan minimum sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterimanya untuk Desa. Kedua jenis data tersebut (Dana Desa dari APBN dan **Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota menyediakan jumlah dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa secara otonom**.

Desentralisasi Fiskal dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama yaitu melakukan desentralisasi kewenangan untuk mengelola pajak. Kedua adalah desentralisasi kewenangan untuk melakukan pengeluaran. Dalam kasus Pemerintahan Desa di Indonesia, pendekatan pertama sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak ada penugasan kewenangan perpajakan ke Desa. Yang terjadi hanyalah desentralisasi pengeluaran untuk fungsi tertentu yang didelegasikan ke Desa. Fungsi secara umum dari Pemerintahan Desa sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa dan diikuti dengan penyediaan dana, namun detailnya masih perlu diperjelas. Kebijakan lebih lanjut mengenai detail fungsi pemerintahan desa diperlukan.

1

Desentralisasi Fiskal pertama di Indonesia terjadi tahun 2001, ditandai dengan peningkatan secara drastis dana transfer ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan desentralisasi kewenangan, terutama untuk pembayaran gaji sekitar 1,1 juta PNS Pusat yang dijadikan PNS Daerah (Handra, 2005).



Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penyediaan layanan publik lokal yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan desentralisasi pertama (kewenangan perpajakan) dicapai melalui model penyediaan layanan publik lokal yang dikemukakan Tiebout (1956). Tiebout mengasumsikan *rumah tangga mudah berpindah-pindah* dan memutuskan untuk tinggal di lokasi yang cocok dengan *preferences* mereka tentang pajak dan barang/jasa yang disediakan. Model tersebut menjelaskan bahwa pemerintah lokal berkompetisi dalam menawarkan tingkat/jenis layanan yang disediakan dan tingkat pajak yang dikenakan dan masyarakat memilih dengan kakinya (*choose by their feet*).

Pendekatan kedua dari desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh teori desentralisasi Oates yang menyatakan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memaksimalkan kesejahteraan sosial karena adanya perbedaan preferensi antara wilayah dan ketiadaan efek *spill-over* (Oates, 1972). Asumsi dari teori Oates adalah bahwa sentralisasi menyediakan barang publik yang seragam dan Pemerintah berjalan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kedua teori (Tiebout dan Oates) menyediakan kerangka teori untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien melalui kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks Dana Desa di Indonesia yang sudah dialokasi sejak 2015 hingga sekarang, diperkirakan akan berdampak terhadap beberapa variabel makro. Penyaluran Dana Desa akan meningkatkan sumber fiskal desa untuk melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Seterusnya Dana Desa berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan usaha mikro dan kecil melalui program pemberdayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi warga desa. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan di perdesaan. Selain Dana Desa, menurut No 6 Tahun 2014, Pemerintah Daerah juga harus menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersifat *mandatory* untuk mendanai belanja aparatur desa. ADD dipastikan mengurangi sumber fiskal Daerah untuk mendanai program/kegiatan lintas desa dan kecamatan seperti perbaikan jalan



kabupaten. Sehingga juga berpotensi menurunkan kinerja daerah secara keseluruhan.

Penelitian empiris sebelumnya terkait dengan implikasi dari gelombang desentralisasi fiskal kedua di Indonesia ini masih sangat sedikit, karena baru saja dimulai. Penelitian yang sudah ada terkait dengan distribusi dana dan formula distribusi Dana Desa tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2015) dan Rochim, dkk (2016) yang menganalisis formula mendistribusikan Dana Desa dan dampaknya terhadap distribusi dana antar Desa di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan studi sebelumnya yang dilakukan Handra, dkk (2016) yang fokus kepada analisis formula Dana Desa dan kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan dengan kesimpulan bahwa "formula Dana Desa menghasilkan distribusi dana yang timpang antar kabupaten/kota dan antar wilayah serta kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik".

## Metodologi

Unit Analisis dari penelitian ini adalah pada level Propinsi. Analisis kuantitatif dilakukan, baik inferensial maupun deskriptif yang didukung oleh data sekunder. Data yang digunakan untuk analisis adalah data sekunder tiga tahun terakhir (2015-2017) tentang Dana Desa yang didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemudian indikator perekonomian berupa pertumbuhan PDRB, tingkat dan kedalaman kemiskinan, dan data kependudukan sebagian besar bisa didapatkan dari web Badan Pusat Statistik.

## Analisis Korelasi

Untuk menganalisis hubungan Dana Desa dengan kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah digunakan pendekatan parsial, dimana yang diukur adalah korelasi antara (i) dana ke daerah akibat adanya Dana Desa terhadap (ii) penurunan jumlah penduduk miskin, (iii) gini rasio, (iv) indeks kedalaman kemiskinan di daerah dan (v) pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis korelasi dilakukan antara variabel Dana Desa per kapita dengan variabel

penurunan jumlah penduduk miskin dan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Analisis Deskriptif**

Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang tersedia, terutama untuk melakukan mapping terhadap distribusi Dana Desa dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Hasil Penelitian dan Analisis**

#### **Dana Desa dan Kemiskinan**

Analisis korelasi antara Dana Desa (diwakili oleh variabel Ln Dana Desa per kapita) dengan penurunan kemiskinan di Perdesaan (prosentase penurunan kemiskinan di Perdesaan year on year pada maret 2016) memperlihatkan bahwa Dana Desa per kapita tahun 2015 memiliki korelasi positif dan signifikan dengan penurunan kemiskinan ( $r=0,55$ ). Korelasi positif dan sedikit di atas 0,5 (signifikan) memperlihatkan bahwa daerah Propinsi yang menerima Dana Desa per kapita yang relatif besar mengalami penurunan kemiskinan di perdesaan yang besar juga untuk tahun 2015.

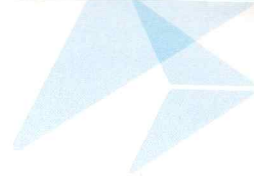


**Tabel 4. Korelasi Antara Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi**

	LDDKap 2015	LDDKap 2016	Pertumbuh an Ekonomi 2015	Pertumbuh an Ekonomi 2016
LDDKap2015	1	1.000**	-.041	.237
LDDKap2016	1.000**	1	-.041	.238
Pertumbuhan Ekonomi 2015	-.041	-.041	1	.624**
Pertumbuhan Ekonomi 2016	.237	.238	.624**	1

\*\* . Korelasi signifikan pada tingkat  $p=0.01$  (2-tailed)

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah



Sedangkan untuk Dana Desa 2016, analisis korelasi menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara Dana Desa per kapita 2016 dengan prosentase penurunan kemiskinan di perdesaan pada semester I 2017. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa meskipun Dana Desa sudah semakin besar di tahun 2016, namun tidak berasosiasi dengan penurunan kemiskinan di perdesaan.

### **Dana Desa dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**

Dana Desa juga diduga berkorelasi dengan penurunan kedalaman kemiskinan di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dihitung oleh BPS setiap semester dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka yang sudah dirilis terakhir adalah pada bulan maret 2017. P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (BPS). Hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita yang diterima provinsi pada tahun 2016 dengan perubahan P1 perdesaan (selisih P1 Perdesaan tahun 2017 dengan 2016) memperlihatkan hubungan yang negatif (-0,523) dan signifikan. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa 2016 berkorelasi negatif dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Angka korelasi sebesar 0,523 memperlihatkan bahwa Dana Desa 2016 berpotensi menurunkan kedalaman kemiskinan di perdesaan.



**Tabel 2. Analisis Korelasi antara Dana Desa Per Kapita 2016 dengan Perubahan (Selisih) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2017 dan 2016**

	DDKap 2016	Selisih P1 2017-2016 Perdes
DDKap2016	1	-.523**
Selisih P1 2017-2016 Perdes	-.523**	1

\*\* . Korelasi signifikan pada tingkat  $p=0,01$

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah

### Dana Desa dan Ketimpangan

BPS mengeluarkan data Gini Koefisien per propinsi untuk perdesaan, perkotaan dan keduanya. Dalam penelitian ini digunakan data Gini Koefisien perdesaan, dengan asumsi bahwa Dana Desa mempengaruhi gini koefisien di perdesaan. Analisis ini mengukur hubungan antara Dana Desa per kapita yang diterima oleh Propinsi dengan Perubahan Gini Koefisien (Delta Gini) perdesaan. Delta Gini 2017-2016 diukur dengan selisih antara Gini 2017 (pada bulan maret 2017) dengan Gini 2016 (pada bulan maret) dan Delta Gini 2016-2015 merupakan selisih antara Gini 2016 dengan Gini 2015. Artinya jika Delta Gini bernilai positif mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan, jika Delta Gini bernilai negatif memperlihatkan terjadinya penurunan ketimpangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Dana Desa per kapita dengan Delta Gini, berarti daerah yang menerima Dana Desa per kapita tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan dan sebaliknya hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan 2016) dengan perubahan gini koefisien (Delta Gini 2015 ke 2016 dan Delta Gini 2016 ke 2017) memperlihatkan bahwa hubungan antara Dana Desa dengan ketimpangan tidak signifikan (lihat tabel 3). Meskipun demikian, jika diperhatikan tandanya, hubungan Dana Desa per kapita dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2015 terlihat negatif. Artinya ada



sinyal bahwa distribusi Dana Desa 2016 berkorelasi dengan penurunan ketimpangan namun tidak signifikan untuk mengambil kesimpulan. Untuk tahun Dana Desa 2016, sinyalnya justru terbalik, yaitu korelasi antara Dana Desa per kapita dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2016 bertanda positif, yang berarti ada sinyal distribusi Dana Desa justru meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan untuk menarik kesimpulan.

**Tabel 3. Korelasi Antara Dana Desa dan Perubahan Gini Koefisien**

	LDDKap 2015	LDDKap 2016	Delta Gini Perdesaan 1615	Delta Gini Perdesaan 1716
LDDKap2015	1	1.000**	-.224	.264
LDDKap2016	1.000**	1	-.231	.267
Delta Gini Perdesaan 1615	-.224	-.231	1	.002
Delta Gini Perdesaan 1716	.264	.267	.002	1
**. Korelasi signifikan pada tingkat $p=0.01$ (2-tailed)				

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah



## Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi


Analisis ini menggambarkan hubungan antara Dana Desa per kapita yang diterima oleh Propinsi dengan pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi per propinsi tahun 2015 didapatkan dari situs BPS sedangkan data pertumbuhan ekonomi Propinsi tahun 2016 adalah data yang didapatkan dari Laporan Nusantara Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan dirilis pada Februari 2017.

**Tabel 4. Korelasi Antara Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi**

	LDDKap 2015	LDDKap 2016	Pertumbuh an Ekonomi 2015	Pertumbuh an Ekonomi 2016
LDDKap2015	1	1.000**	-.041	.237
LDDKap2016	1.000**	1	-.041	.238
Pertumbuhan Ekonomi 2015	-.041	-.041	1	.624**
Pertumbuhan Ekonomi 2016	.237	.238	.624**	1

\*\* . Korelasi signifikan pada tingkat  $p=0.01$  (2-tailed)

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah



Analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan 2016) dengan pertumbuhan ekonomi (2015 dan 2016) memperlihatkan bahwa hubungan antara Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi tidak signifikan baik untuk tahun 2015 maupun untuk tahun 2016 (lihat tabel 4). Jika diperhatikan tandanya (sign), Dana Desa tahun 2016 berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi 2016, namun tidak cukup signifikan untuk mengambil kesimpulan tersebut. Untuk tahun 2015, sama sekali tidak bisa dilihat tandanya, karena nilai korelasinya mendekati nol.

## **Pemetaan Kinerja Propinsi Dan Kaitannya Dengan Distribusi Dana Desa**

### **Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan**

Pada tabel 5 dihasilkan matriks yang mengelompokkan Propinsi ke dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran I adalah Propinsi yang menerima Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata nasional namun mengalami penurunan kemiskinan di atas rata-rata nasional. Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi yang kinerja penurunan kemiskinannya baik dan terutama bukan didorong oleh Dana Desa

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang penurunan kemiskinannya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan penurunan kemiskinan juga di atas rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah Propinsi yang penurunan kemiskinannya juga sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata nasional dan penurunan kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya rendah dikaitkan dengan penurunan kemiskinannya. Dana Desa per kapita yang diterima di atas rata-rata nasional, namun penurunan kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional. Jumlahnya jauh lebih banyak dari Propinsi pada kuadran I.



Jumlah terbanyak adalah pada Kuadran IV yaitu 12 Propinsi yang memperlihatkan bahwa Dana Desa belum optimal untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Pengelompokan ini sekaligus mengkonfirmasi hasil analisis korelasi yang hanya pada level 0,55 (tidak cukup kuat).

**Tabel 5. Matriks Pengelompokan Daerah Berdasarkan Distribusi DD dan Penurunan Kemiskinan**

	DD Per kapita dibawah rata-rata nasional	DD 2016 Per kapita di atas rata-rata nasional
Penurunan Jumlah Kemiskinan di atas rata-rata nasional (2016)	<b>I</b> Bali Riau Sulawesi Selatan Jawa Barat Banten Jawa Timur	<b>II</b> Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Jambi Sulawesi Barat Kalimantan Barat Sumatera Utara
Penurunan Jumlah Kemiskinan di bawah rata-rata nasional (2016)	<b>III</b> Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur DI Yogyakarta Lampung Kepulauan Riau Bangka Belitung Sumatera Barat	<b>IV</b> Kalimantan Selatan Aceh Sumatera Selatan Gorontalo Nusa Tenggara Timur Papua Barat Bengkulu Maluku Sulawesi Tengah Papua Maluku Utara Kalimantan Utara

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah

## Distribusi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya pada tabel 6 dihasilkan matriks yang mengelompokkan Propinsi ke dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran I adalah Propinsi yang menerima Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata nasional namun mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi yang pertumbuhan ekonominya tidak didukung oleh Dana Desa.

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang pertumbuhan ekonominya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana



Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi juga di atas rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah Propinsi yang pertumbuhan ekonominya juga sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi juga di bawah rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya rendah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dana Desa per kapita yang diterima di atas rata-rata nasional, namun pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

Jumlah terbanyak berada pada kuadran II, artinya terdapat 15 propinsi yang pertumbuhan ekonominya didorong juga oleh Dana Desa. Namun secara statistik hubungan tersebut belum signifikan untuk pengambilan kesimpulan

**Tabel 6. Matriks Pengelompokan Propinsi Tahun 2016**

	DD 2016 Per kapita di bawah rata-rata nasional	DD 2016 Per kapita di atas rata-rata nasional
Pertumbuhan Ekonomi di atas rata-rata nasional (2016)	<b>I</b> Sulawesi Selatan Bali Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Banten Kepulauan Riau Sumatera Barat	<b>II</b> Sulawesi Tengah Papua Sulawesi Tenggara Gorontalo Kalimantan Tengah Jambi Sulawesi Utara Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Bengkulu Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan
Pertumbuhan Ekonomi di bawah rata-rata nasional (2016)	<b>III</b> Lampung DI Yogyakarta Bangka Belitung Riau Kalimantan Timur	<b>IV</b> Papua Barat Kalimantan Selatan Aceh Kalimantan Utara

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah



Sebaliknya terdapat empat Propinsi yang tetap berada di kuadran IV, yang berarti kinerja penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional meskipun mendapat Dana Desa per kapita di atas rata-rata nasional, yaitu:

1. Propinsi Aceh
2. Propinsi Kalimantan Selatan
3. Propinsi Papua Barat
4. Propinsi Kalimantan Utara

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Analisis data sekunder dengan metode korelasi menunjukkan bahwa hubungan distribusi Dana Desa dengan penurunan kemiskinan sangat lemah dan tidak bisa disimpulkan. Penelitian ini mendeteksi adanya hubungan positif antara distribusi Dana Desa dengan penurunan tingkat kemiskinan pada tingkat Propinsi untuk Dana Desa 2015 (yang berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2016). Namun hubungan positif itu tidak berlanjut untuk Dana Desa 2016 (korelasinya dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2017 tidak signifikan). Selanjutnya analisis korelasi antara Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 pada tingkat propinsi menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya, penelitian ini belum dapat menyimpulkan keterkaitan Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, hasil analisis korelasi antara Dana Desa 2016 dengan indeks kedalaman kemiskinan tahun 2017 di tingkat propinsi menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa berkorelasi dengan penurunan kedalaman kemiskinan di perdesaan. Analisis data sekunder antara Dana Desa dengan gini koefisien di perdesaan pada tingkat Propinsi menunjukkan hubungan keduanya tidak signifikan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa distribusi Dana Desa tidak punya asosiasi dengan penurunan ketimpangan di perdesaan, meskipun data 2015 dan 2016 menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan secara nasional.

## Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hubungan Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, namun korelasinya sangat lemah. Temuan ini terkonfirmasi oleh penelitian Handra dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa formula Dana Desa kurang tepat mengakomodasi kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Untuk itu, sangat penting untuk terus memperbaiki formula distribusi Dana Desa jika menginginkan dampak yang lebih optimal untuk penurunan tingkat kemiskinan.

Lemahnya dampak Dana Desa terhadap kemiskinan juga terlihat disebabkan oleh kinerjanya yang berbeda antar Propinsi, sebagaimana terlihat dari matriks *pengelompokan*. Terdapat Propinsi yang kinerja penurunan kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, padahal jumlah Dana Desa per kapita yang diterima di atas rata-rata nasional. Untuk daerah-daerah tersebut, perlu dilakukan supervisi yang lebih baik agar Dana Desa lebih berdampak terhadap penurunan kemiskinan.



## Referensi

- Bank Indonesia. 2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional: Laporan Nusantara Februari 2017*. Vol XII Nomor 1.
- Badan Pusat Statistik, 2017. <http://www.bps.go.id/>.
- Handra, Hefrizal, 2016. *The implication of Village Fund on Distribution of Fund Between Region in Indonesia. a paper presented at the 13<sup>th</sup> IRSA International Conference. 25-26 July 2016. Malang.*
- Handra, Hefrizal. 2015. *A Study of Indonesia's Fiscal Equalisation Mechanism in the Early Stages of Decentralization. Ph.D Thesis. Flinders University of South Australia.*
- Lewis, Blane D., 2002. *Indonesia. In Intergovernmental Fiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challenges for the Future. Smoke P. Kim YH.*
- Lewis, Blane D. 2015. *Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. Public Administration and Development 2015. Published online in Wiley Online Library*
- Martinez-Vazquez J. Vaillancourt F (eds). 2011. *Decentralisation in Developing Countries. Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution. Edward Elgar: Cheltenham.*
- Oates, Wallace. 1972. *Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich.*
- Porcelli, Francesco. 2009. *Fiscal Decentralisation and efficiency of government: A brief literature review. Department of Economics - University of Warwick (UK). accessed by June 2017 at: <https://pdfs.semanticscholar.org/d01a/c890a7038b77f9527c->*

9c052491697acf429b.pdf

*Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.*

*Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*

*Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

*Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

*Rokhim, R. W. Adawiyah dan M.R. Astrini. 2016. "Kajian Akademik Alternatif Formula Dana Desa." Draft Kajian Article 33.*

*Handra, Hefrizal; Machfud Sidik; Sentor Satria; Suhirman; Erny Murniasih; Devi Suryani; Dylan Robertson, 2016. Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Analisis Kebijakan. KOMPAK.*

*Tiebout, Charles M. 1956. 'A Pure Theory of Local Expenditure.' The Journal of Political Economy. Vol.64 Page 416-424.*